



Open Source = Cut Budget?

Akhir bulan Agustus 2004 yang lalu, gubernur California, **Arnold Schwarzenegger** yang dikenal sebagai Terminator membuat satu pernyataan yang cukup kontroversi, yaitu menghimbau seluruh jajarannya untuk memotong anggaran belanja negara dengan menggunakan program *open source*. Itu berarti menghentikan dukungannya terhadap Microsoft, mengikuti beberapa negara bagian Amerika yang sudah sejak beberapa lama membentuk *Government Open Code Collaborative Repository* (<http://www.gocc.gov>).

Indonesia juga tidak kalah dengan gerakan Mr. Terminator tersebut, karena satu bulan sebelumnya, yaitu pada 1 Juli 2004, lima menteri di pemerintahan Megawati yaitu Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Kehakiman dan HAM, serta Menteri Pendidikan Nasional secara resmi menyatakan akan menggalakkan penggunaan standar software terbuka melalui gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS) yang konon dapat menghemat belanja sampai 20 triliun rupiah.

Kalau melihat kenyataan yang terjadi, sebetulnya sudah sangat jelas bahwa konsep open source ini sudah diplesetin dari sasaran utamanya, yaitu kebersamaan untuk mengembangkan satu sistem. Karena dari dua kasus di atas terlihat bahwa penggunaan program open source hanya untuk pengencangan ikat pinggang karena dana terbatas.

Harga murah merupakan salah satu efek dari gerakan open source, karena di dalamnya tidak ada *mark-up* untuk penelitian, pengembangan dan pendistribusian seperti yang dilakukan oleh pengembang software seperti Microsoft, Computer Associate, atau Oracle. Dalam gerakan tersebut hanya ada semangat kebersamaan, semangat belajar, dan *sharing* ilmu di komunitas yang sangat luas ini.

Pemerintah Amerika dan Indonesia memanfaatkan momen ini memang tidak salah sama sekali, karena open source merupakan produk yang paling diharap-harapkan dan merupakan solusi yang paling tepat dalam zaman susah seperti sekarang. Tetapi, semangat pengembangan sistem yang sudah jalan ini dapat tersendat karena munculnya ideologi lain. Konsep harus menyerahkan pengemba-

ngan lanjutan ke komunitas open source akan mandeg. Jumlah pemakai menjadi sangat banyak, sementara pengembangnya akan jalan di tempat, karena kemungkinan banyak pengembang yang tidak berminat lagi untuk turut serta dalam komunitas.

Kejadian lain, beralihnya sang pengembang yang tadinya secara suka rela mengirimkan idenya ke komunitas, menjadi tertutup, dan tidak pernah berkiprah lagi, karena yang bersangkutan sudah dikerjakan oleh program pemerintah, dan dianggap sudah merupakan program tertutup untuk aplikasi yang membawa nama negara di dalamnya. Secara tidak langsung, dua kejadian di atas dapat menyebabkan tersendatnya perkembangan open source yang sekarang mulai banyak dikenal masyarakat luas.

Khusus di Indonesia, setelah beberapa bulan program IGOS diluncurkan, saya tidak melihat gerakan yang nyata atas deklarasi tersebut. Bahkan pada awal deklarasi tersebut, dengan hati-hati

...program open source hanya untuk pengencangan ikat pinggang karena dana terbatas.

Meneg Kominfo menyatakan bahwasanya tidak lantas besok semua PC harus mengganti software-nya ke peranti lunak terbuka. Semua PC yang ada di lingkungan kantor pemerintahan masih menggunakan software bajakan. Kilah mereka adalah ketidaktahuan atas semua peranti yang dikirim ke mejanya melalui proyek pengadaan.

Kelihatannya, program IGOS dari lima menteri ini hanya sampai di acara seremonial saja, karena tidak sampai di ujung dari rantai pemerintahan di Indonesia. Bahkan web-nya <http://www.igos.web.id/> sudah jarang jalan dan semua ini menyebabkan beberapa aktivis open source merasa lebih sakit hati lagi, karena selain diplesetin, komunitasnya dijadikan komoditi untuk satu hal yang bukan merupakan prinsip dasar dari keberadaan mereka.

Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan pengembang open source, banyak yang tidak peduli dengan semua ini. Artinya mereka tetap saja jalan dengan apa yang sudah dilakukan. Seperti pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Komunitas open source di Indonesia tergolong masih sedikit, sehingga jarang sekali yang turut berpartisipasi dalam program IGOS. Karena yang dimaksud program IGOS dalam deklarasi tersebut sepertinya hanya sebatas mengganti program Microsoft Windows dan Microsoft Office dengan Linux dan OpenOffice. 